Konteks Pembebasan Anak Pinggiran

(ditulis untuk paper diskusi "Musik sebagai Media Pembebasan Anak Pinggiran)
Yogyakarta - 26 Juni 1999

Ibe Karyanto

Sebagai pembukaaan saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sependapat dengan Panitia yang memilih istilah Anak Pinggiran dalam konteks diskusi kita ini. Mungkin, sekali lagi bisa jadi, anak pinggiran memang bukan istilah yang jamak dijamah. Kita lebih sering dibiasakan mendengar istilah anak jalanan atau, meskipun agak jarang, anak pemukiman kumuh atau 'anak bermasalah' seperti yang dituduhkan dalam Undang-undang Peradilan Anak. Karena itu kalau hanya berorientasi sebatas isu, tentu istilah anak jalanan lebih terdengar 'sexis' dibandingkan anak pinggiran. Karena memang cukup banyak entah itu kelompok. lembaga swadaya atau bahkan lembaga-lembaga dana sendiri, termasuk pers pun tidak jarang lebih terangsang untuk mendekati isu anak jalanan. Bahkan di tengah krisis saat ini yang menyebabkan 'booming' penderitaan anak, fenomena itu masih sering muncul. Masih cukup banyak pandangan (bukan pilihan) yang cenderung melihat persoalan praktek kekerasan terhadap anak hanya dari sisi jalanan. Sementara di pemukiman, di balik tembok industri, perusahaan perkebunan dan dari tempat-tempat lain, anak juga mengalami praktek kekerasan yang sama beratnya.

Tentu saja pembicaraan saya ini tidak bermaksud untuk mencari perbandingan antara jenis penderitaan anak yang satu dengan yang lain. Justru sebaliknya dengan menunjuk pada istilah anak pinggiran, kita diajak untuk masuk pada sebuah dunia 'peioratif' yang luas. Pinggiran bagi saya menunjuk pada sebuah dunia yang diasingkan, dimana setiap entitas di dalamnya hidup dalam habitat yang kering. Kisah anak berikut mungkin bisa membantu untuk mengenal dan memahami batas-batas dunia tersebut. Beranjak dari konteks tersebut kemudian saya ingin mencoba melihat tema pembebasan, seperti yang ditawarkan Panitia.

Batas Dunia Pinggiran

"...Saya ditangkap di pintu masuk kereta di stasion Senen. Saya sedang nomplok kereta api dan sesudah ditangkap saya dibawa ke kantor Polsus Senen. Polsus yang menangkap saya bernama P, dulunya Polsus itu juga gembel seperti saya. Sesudah itu saya dipukuli pakai pentungan. Saya ditendang pakai sepatu boot. Saya dibotakin dan uang saya diambil sebesar Rp. 4.000..."

Kisah yang lebih merupakan kesaksian tersebut ditulis Ucok pada awal tahun 1995. Namun bukan berarti hanya sekali itu Ucok mengalami perlakuan semena-mena dari aparat. Begitu juga bukan hanya Ucok yang mengalami perlakuan seperti itu. Masih banyak, rata-rata teman sekomunitasnya di Jatinegara, hampir semua pernah mengalami tindak kesewenangan dari aparat. Sekalipun demikian, toh tindakan aparat tidak serta merta menghentikan lahirnya generasi-generasi baru yang terpaksa harus *survive* di bawah bayang-bayang kekerasan sikap aparat. Generasi seperti Ucok adalah generasi yang tidak punya pilihan, terlahir dalam satu siklus kekerasan sistematik. Ucok sendiri mengaku tidak pernah kenal siapa orang yang melahirkannya ke dalam dunia yang serba gelap. Dalam konteks yang lain Ucok sama tidak pahamnya dengan Mansur yang sedari kecil harus lahir di tengah kegelapan, menghadapi perlakuan kasar dari laki-laki yang dikenal sebagai bapaknya sendiri.

"…..Sedangkan saya hampir mati dikejar (ayah) sama pisau dan setelah malam saya diseret ke sawah lewat turunan, digulung-gulungkan dan dilelepin di lumpur. Ibu saya jerit-jerit dan adik saya sampai pingsan. Saya juga selalu kabur tapi tidak jauh-jauh. Lama-lama saya diberitahu sama kakak saya, kamu lebih baik kemana saja yang jauh. Akhirnya saya turuti, saya kabur. Saya minta ijin sama ibu saya, dia tidak boleh sampai nangis-nangis. Tapi terpaksa saya lakukan, saya tidak tahan lagi ……"

Sejak saat itu, awal tahun 90-an Mansur meninggalkan rumah, mengembara tanpa tahu persis harus kemana. Dari Lampung, Bakahuni, Cilegon sampai akhirnya bertemu dan bergabung dengan komunitas anak-anak jalanan di Ramayana, Pasar Rawa Bening - Jakarta Timur. Sama seperti anak-anak lain dalam komunitasnya, Mansur harus membangun *Survival System* bukan hanya sekedar untuk makan, melainkan juga menghadapi atmosfer kehidupan lingkungannya yang serba keras. Bengisnya sikap dan perlakuan aparat, superioritas orang-orang *gedhe* dan cibiran sinis masyarakat sekitar adalah bentuk kekerasan yang setiap saat datang mengancam Mansur dan teman-temannya. Namun sebaliknya sekalipun tahu mahalnya harga yang harus dipertaruhkan, anak-anak terpaksa tetap harus melakukan tindakan yang, oleh sementara orang, dianggap kriminal atau melanggar norma.

Perjuangan yang sama juga dialami oleh Doelgani (almarhum). Doelgani lahir dari seorang ibu yang bekerja sebagai pembantu penjual jasa di pasar. Bapaknya biasa bekerja sebagai tani kuli. Sebagaimana kuli umumnya yang tidak selalu bisa pasti mendapat pekerjaan, demikian halnya yang dialami bapaknya. Kemiskinan semakin menyayat keluarga Doel ketika lahan yang biasa jadi tumpuan kerja berubah menjadi sebuah kompleks industri. Sejak saat itu pula bapaknya Doel mulai memperlihatkan perubahan kebiasaan. Ia mulai jarang pulang. Sampai akhirnya tidak pulang sama sekali dan tidak diketahui kabarnya. Kondisi keluarga seperti itu menuntut Doel kecil meninggalkan kesempatan bermain yang biasa dilakukan oleh kebanyakan kanak-kanak. Doel dipaksa keadaan untuk bisa *survive* sendiri, bahkan dipaksa keadaan untuk bisa membantu menambah penghasilan ibunya. Doel kecil pun berjualan plastik di pasar atau menjual jasa apa saja yang bisa laku di pasar. Tidak tahan dengan rutinitas di kampung, apalagi ketika ibunya kawin lagi, Doel memutuskan hijrah ke Jakarta bersama beberapa temannya, termasuk Mansur.

Setelah berkenalan dengan Mansur di jalanan saya ingin mengajak berkenalan dengan Dadi, teman Mansur yang tinggal di pemukiman. Berbeda dengan Mansur dan teman-temannya di jalanan yang pada dasarnya bisa mengatur dan menentukan sendiri cara hidupnya, Dadi tidak punya waktu banyak untuk belajar atau bermain. Dari pagi, pk. 08.00 sampai menjelang tengah malam pk. 23.00, anak dari keluarga Indramayu itu harus membantu menjaga warung usaha ibunya. Sebelumnya, anak jebolan kelas 2 SD itu, harus bekerja untuk membantu menjadi pilar ekonomi keluarganya yang hanya tergantung dari penghasilan ayahnya sebagai tukang borongan. Tidak seberapa hasil yang bisa diperoleh Dadi dari pekerjaannya sebagai pemungut besi. Itupun harus diserahkan kepada orang tuanya. Kadang ia harus 'nyatut' sebagian dari hasil jerih payahnya sendiri sekedar untuk jajan. Kecuali pulang kampung, ke Indramayu, Dadi tak pernah beranjak jauh dari lingkungannya di pinggir jalan tol Cakung-Cilincing.

Berbeda pula antara Dadi dengan temannya Sandy dari Penas Tanggul - Jakarta Timur. Masih agak beruntung, Sandy sempat ikut merasakan duduk di bangku SMP kelas satu, meskipun ketika beban penderitaan ekonomi keluarga semakin berat Sandi terpaksa harus berani mengambil keputusan meninggalkan bangku sekolah. Selebihnya sama dengan Dadi dan teman-temannya, tidak ada pilihan lain buat Sandi selain harus bekerja untuk membantu membayar SPP SD adiknya

dan sekedar membantu Emaknya. Ngamen, hanya dengan kecrekan, salah satu ketrampilan yang dimiliki, yang paling mungkin menjadi modal kerja.

Sekalipun dihadapkan pada situasi kemiskinan, tidak setiap anak serta merta bersedia dan gampang mencari 'jalan pintas', melakukan tindak kriminal atau menghancurkan harga dirinya. Sandy hanyalah salah satu contoh anak yang mampu dan berani mengatakan 'tidak' pada lingkungannya yang biasa mencari 'jalan pintas'. Dalam situasi yang berbeda Sandy bisa dibilang sama dengan Tarini, anak perempuan yang pada akhirnya berani mengatakan tidak pada praktek eksploitasi yang dilakukan orang tuanya sendiri. Sekalipun konsekuensinya jelas Tarini, gadis yang berasal dari Indramayu itu dikucilkan dari lingkungan budaya Indramayu.

"...Karena sangat miskinnya sampai-sampai ayah saya khilaf ingin menjadikan saya seorang pelacur yang sangat hina. Saya mengerti ayah saya sangat membutuhkan bantuan saya, namun saya menolak keinginan ayah saya karena saya tidak mau hidup kaya dengan cara yang tidak layak. Bukannya saya ingin melawan orang tua, namun saya berpikir kalau saya menurut kepada orang tua nanti saya tidak akan punya harga diri..."

Kalau dikatakan lebih beruntung, mungkin Sandy dan Tarini lebih beruntung dibandingkan Carni yang hidup di tengah samudera sampah di TPA-DKI. Sepanjang hari dari matahari terbit sampai tenggelam Carni dan anak-anak sebaya hanya berkutat dengan sampah. Jangankan sekolah, untuk menyisakan waktu sekedar bermain saja sulit. Seperti teman-temannya yang sebaya, Carni oleh orang tuanya sengaja diajak meninggalkan desa kelahirannya, Indramayu, untuk memperkuat upaya keluarga mengais rejeki di lahan sampah di Desa Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi. Tak ada aroma udara lain yang bisa menggelitik hidung Carni selain bau sampah. Ragam budaya Jakarta yang letaknya tidak begitu jauh terasa masih jauh dan asing bagi fantasi Carni, sekalipun secara geografis letaknya tidak jauh dari kota. Di tengah hamparan sampah yang rentan dengan berbagai jenis penyakit itu, Carni dan teman-temannya tidak pernah diperhitungkan sebagai warga yang bisa menerima pelayanan kesehatan umum. Alasannya sederhana, karena mereka tidak punya kartu keluarga atau identitas kependudukan lain.

Marginalisasi Sistematik

Kisah anak-anak tersebut memberikan kerangka untuk mengenal lebih dekat siapa itu anak pinggiran. Mengacu pada pernyataan Konvensi Hak Anak - PBB, kondisi yang harus dihadapi Sandi, Tarini dan teman-temannya adalah kondisi yang berlawanan dengan dunia anak-anak pada umumnya, yang seharusnya; *"...demi pengembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, hendaknya (anak) tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu lingkungan yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian..."* Dilihat dari posisi keberadaan Ucok, Doel atau Carni batas pernyataan KHA tersebut merupakan poros yang terlihat sangat jauh dari jangkauan. Dunia itu begitu kecil, terbatas dan mahal, sehingga anak-anak macam Sandy atau Tarini dan teman-temannya tidak mudah untuk mendekat apalagi masuk ke dalamnya.

Dengan batas pengertian tersebut saya memahami pinggiran sebagai sebuah dunia eksploitatif yang ditandai dengan kekerasan sistematik. Meminjam istilahnya (kalau tidak salah) Ignas Kleden saya mencoba menempatkan kekerasan dalam 3 tipologi yang sederhana. Bentuk kekerasan yang paling kasat mata dan sering kita jumpai adalah represi atau penindasan. Represi atau penindasan tersebut dalam wujud teknisnya muncul dalam bentuk kekerasan yang menggunakan kekuatan fisik, baik berupa penyiksaan maupun ancaman, untuk memaksakan kehendak si pelaku dan mengatur atau menekan keinginan pihak lain. Dalam skala besar kekerasan ini menjadi sarana

yang paling effektif bagi aparat untuk di satu pihak menundukkan anak-anak dan di lain pihak menjaga kelangsungan sebuah sistem.

Selama ini aparat negara bisa seenaknya melakukan tindak kekerasan pada anak karena sistem yang dibangun memberi perlindungan legal pada aparat sejauh tindakan kekerasan itu dilakukan pada anak yang melakukan tindak 'kriminal', pada anak-anak yang "mengganggu ketertiban" dan pada anak yang "melawan orang tua". Sementara rumusan "mengganggu ketertiban" sendiri tidak pernah jelas. Ada kalanya "mengganggu ketertiban" dipakai sebagai legitimasi tindak kekerasan aparat demi sebuah "kehormatan" peraturan perundangan, seperti kalau di Jakarta menjaga wibawa Perda no.11 tahun 1988 yang ingin menjadikan Jakarta bersih dan mempesona. Namun legitimasi yang sama juga sering dipakai aparat untuk memperlancar bisnis. Penggusuran adalah praktek kekerasan fisik dalam bentuk lain yang sering kita jumpai.

Bentuk kekerasan yang dilakukan aparat negara tersebut juga menurun pada aparat perusahaan tempat anak-anak menggantungkan kehidupannya. Sama seperti aparat negara yang mendapatkan perlindungan legal, demikian juga aparat perusahaan mendapatkan perlindungan legal untuk melakukan tindak kekerasan sejauh itu menguntungkan perusahaan. Bahkan bukan tidak mungkin kekerasan yang sama dilakukan oleh aparat perusahaan, mandor atau pengawas, hanya memeras penghasilan anak untuk menambah keuntungan kelompoknya. Kekerasan seperti di tingkat perusahaan ini bisa langgeng karena sistem yang dibangun memungkinkan sebuah perusahaan, atau bisnis apapun, untuk mendapatkan dukungan dari aparat negara sejauh perusahaan tidak mampu lagi melakukan tekanan dengan aparatnya sendiri.

Dalam lingkup komunitas yang lebih kecil, keluarga, kekerasan merupakan bentuk tindakan yang paling sering dilakukan oleh orang tua (orang dewasa) untuk memaksakan kehendak, mengatur atau menekan keinginan anak. Kekerasan orang tua terhadap anak bisa mengambil bentuk yang paling halus sampai pada tindakan yang paling kasar sekalipun. Celakanya kekerasan pada anak di tingkat keluarga juga lebih sering terjadi karena motivasi pelampiasan akibat frustasi, kecewa atau rasa ketidakmampuan menghadapi beban penderitaan.

Jenis kekerasan kedua yang tidak kalah ampuhnya adalah kekerasan kultural atau budaya. Kekerasan jenis kedua ini secara langsung memberikan peluang langgengnya praktek represi atau kekerasan fisik di lingkungan keluarga atau di masyarakat pada umumnya. Kekerasan kultural dalam kamus pengertian politik sering kita kenal dangan istilah hegemoni, yaitu penguasaan makna yang didasarkan atas kekuasaan bukan atas kemampuan profesional yang diperolehnya dengan belajar atau pun apa. Sedangkan dalam pengertian warisan sosial-budaya kekerasan kulutral mendapat bentuknya dalam pola budaya paternalistik yang memberi keleluasaan pada berkembangnya kekuasaan berdasarkan senioritas.

Dalam keseharian penerimaan kultur seperti itu jelas menempatkan anak pada posisi yang sangat lemah. Tidak ada ruang partisipasi yang mungkin dimasuki anak untuk sekedar menyampaikan gagasannya apalagi untuk mengatakan tidak pada ucapan orang tua. Apapun yang diucapkan oleh orang tua serta merta harus diterima karena dipastikan lebih benar atau paling tidak lebih baik dari pada pertimbangan si anak sendiri, sekalipun jelas pilihan orang tua tersebut menyiksa anak. Bahkan kadang ucapan atau kehendak orang tua tidak langsung diucapkan, tetapi anak harus mengerti kemauan orang tua. Kekerasan kultural macam ini tidak hanya mematikan partisipasi anak, melainkan juga mempersempit peluang kreativitas dan daya nalar anak-anak. Kultur kekerasan semacam ini juga harus dihadapi anak-anak di dunia pendidikan, sekolah. Anak

diharuskan tunduk pada ucapan guru bukan karena kebenarannya, melainkan karena guru dianggap sah untuk menguasai anak selama anak berada pada lingkungan sekolah.

Tipologi ketiga adalah kekerasan struktural. Kekerasan struktural secara langsung dirasakan oleh orang tua atau lingkungan keluarga anak-anak. Namun, meski jenis kekerasan ini jarang langsung mengena pada anak, dampak biasnya justru terasa lebih kuat mengobrak-abrik masa keemasan anak. Kekerasan struktural adalah bentuk sebuah tatanan sosial yang tidak berimbang yang memberi peluang bagi kelompok tertentu untuk mendominasi kelompok lain. Secara transparan kekerasan struktural paling nampak dalam dunia ekonomi. Monopoli adalah salah satu bentuk pola budaya yang dihidupkan secara sistematik untuk memberi peluang usaha berlebihan bagi satu kelompok, sementara kelompok lain dibiarkan mati. Bahkan kalau perlu untuk keberhasilan usaha kelompok, monopoli aparat negara tidak ragu untuk 'membunuh' kelompok lain.

Dalam skala kehidupan anak-anak saya masih teringat contoh ketika sekitar tahun 1993 stasiun Jatinegara dinyatakan tertutup untuk usaha asongan yang dilakukan anak-anak. Pada awalnya alasan pelarangan itu jelas berkaitan dengan pelaksanaan KTT-Non Blok, dimana salah satu acara protokolernya para tamu negara akan melintasi stasiun Jatinegara dengan kereta eksekutif baru menuju Bandung. Di tengah usaha advokasi ketika KTT selesai, otoritas stasiun tetap memberlakukan larangan dengan alasan kebersihan dan ketertiban stasiun. Namun dari hasil investigasi anak-anak diketahui bahwa pihak stasiun sedang melakukan negosiasi dengan para pengusaha untuk membuka kios-kios dagang di dalam stasiun. Tidak lama berselang memang kemudian diketahui berdirilah kios-kios usaha di dalam stasiun Jatinegara. Praktek yang sama juga nampak pada model pelaksanaan proyek, seperti Operasi Hari Esok Penuh Harapan sepuluh tahun lalu. Tentu masih banyak praktek-praktek monopoli dalam skala kecil maupun besar yang merugikan usaha anak-anak, baik seara langsung atau tidak.

Konteks Pembebasan

Ketiga bentuk kekerasan tersebut mempunyai implikasi yang berbeda satu sama lain. Sekaligus ketiga kekerasan yang sama merupakan tindakan sistematik yang secara akumulatif menempatkan anak-anak yang berasal dari komunitas sosial yang lemah akan menjadi semakin lemah dan bahkan hancur seluruh sendi kehidupannya. Sementara di sisi lain sistem kekerasan yang sama akan melanggengkan sebuah kemapanan atau lebih tegasnya memberikan peluang yang lebih nyaman pada kelompok sosial yang sebelumnya sudah nyaman. Sekali lagi, mengacu pada cita-cita Konvensi Hak Anak seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, kekerasan yang sistematik seperti ini hanya memungkinkan dunia ideal atau masa keemasan anak hanya bisa dinikmati oleh sekelompok anak-anak yang berasl dari lingkungan atau keluarga yang mampu masuk dalam lingkaran penjaga sistem. Sementara anak-anak lain dari kelompok sosial yang lemah, yang jumlahnya lebih banyak, tetap saja terpuruk pada kehidupan yang serba tidak pasti.

Sekalipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres no. 36 tahun 1990, namun toh tidak serta merta menjamin adanya perubahan yang bisa mengakomodir setiap pasal yang ada dalam Konvensi. Kalaupun ada, beberapa turunan peraturan perundangan atau kebijakan, baik di tingkat nasional maupun lokal, itupun masih sangat terbatas. Sistem yang ada sangat memungkinkan struktur yang ada memanipulasi atau membatasi setiap bentuk praktek implementasi perlindungan hak anak. Sementara sistem yang sudah menjadi jalinan kusut itu mengakibatkan efek yang berbeda-beda bagi kehidupan anak-anak.

Kekerasan fisik yang dipakai untuk memaksakan kehendak sendiri tegas-tegas melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan ancaman dari tindak kekerasan (Psl. 19, 37 - KHA). Lebih dari itu praktek kekerasan yang sama juga telah melanggar otonomi anak sebagai entitas, individu yang merdeka. Sementara kekerasan kultural merupakan praktek tindakan yang jelas-jelas berimplikasi langsung pada matinya kebebasan berpikir dan mengkerdilkan daya kritis serta kemampuan kreatif anak. Hak anak untuk bebas berpendapat, menyatakan gagasan dan berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya (Psl. 12, 14, 28, 29, 31 - KHA) dieliminir sedemikian rupa sehingga anak hanya menjadi robot yang harus berjalan pada rel yang sudah ditentukan. Sedangkan kekerasan struktural secara langsung mempersempit peluang hak anak untuk mempertahankan hidup dan terhindar dari praktek eksploitasi dan manipulasi.

Dengan melihat keseluruhan situasi dan kondisi yang harus dihadapi anak-anak, maka pengertian pinggiran dan pembebasan menjadi semakin jelas. Pinggiran menunjuk pada suatu kondisi kehidupan anak-anak yang minim, kalau tidak boleh dibilang tidak ada, perlindungan hak. Secara transparan pinggiran nampak dalam wujud keterbatasan akses dan fasilitas pengembangan potensi anak untuk menjadi manusia yang otonom dan integratif akibat dari sebuah proses marjinalisasi sistematik.

Kalau melihat kondisi seperti itu maka pembebasan bisa kita mengerti dalam dua pengertian. Pertama adalah pembebasan sebagai pilihan sikap **dari** praktek sebuah sistem yang senantiasa memproduksi kekerasan dan menindas hak anak. Penyelesaian persoalan anak pinggiran tidak akan pernah tuntas kalau bentuk atau *polecy* yang ditawarkan masih merupakan produk dari sebuah sistem yang represif. Cukup banyak contoh bentuk-bentuk yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan anak pinggiran tapi belum ada satupun yang *sustainable*, baik di tingkat lokal sekalipun. Sistem yang sarat dengan kecenderungan dominasi, monopoli menciptakan kerangka kerja yang hanya berorientasi pada proyek. Tidak mustahil kalau setiap usaha penyelesaian persoalan anak-anak pinggiran pun cenderung berorientasi pada proyek. Dana habis, proyek berhenti. Peduli amat dengan kelanjutannya.

Karena itu pembebasan sama sekali bukan sikap yang sekedar puas dengan usaha menyelesaikan persoalan anak dengan memindahkan anak dari pinggir ke tengah sistem. Sebaliknya, pengertian kedua, dengan melihat pada kenyataan sistem yang demikian tidak adil, pembebasan selayaknya merupakan upaya **untuk** membangun sebuah tatanan alternatif yang lebih adil dan akomodatif. Kalaupun belum ada niatan baik untuk melakukan perubahan sistem, terbuka peluang bagi setiap anggota masyarakat baik secara individu atau kelompok untuk mengembangkan alternatif model pembebasan untuk anak pinggiran. Syarat yang harus dipenuhi tentu adalah melibatkan anak sendiri masuk dalam proses membangun sebuah bangunan kemanusiaan.

****

Dalam upaya membangun sebuah bangunan kemanusiaan, pembebasan bukan sekedar hasil melainkan lebih merupakan atmosfer yang menghidupkan setiap niat untuk melakukan eksplorasi tanpa henti. Sebuah eksplorasi yang bertujuan menembus segala macam batas termasuk sistem yang sudah demikian kusut, tak terbatas hanya pada bentuk atau media. Justru sebaliknya atmosfer pembebesan demikian terbukanya bagi setiap orang untuk secara jeli menangkap setiap peluang yang mungkin dikembangkan sebagai sebuah alternatif. Saya yakin atmosfer pembebasan itu ada pada setiap anak pinggiran, ada pada setiap anak yang merasakan hidup dalam penindasan.

Kalau kemudian saya dan anak-anak membangun sebuah Sanggar sama sekali bukan bermaksud mengecilkan potensi dan harapan anak. Sanggar hanyalah sebuah ruang untuk menyatukan potensi dan harapan pembebasan setiap anak. Karena itu sebuah bangunan sanggar sendiri menuntut syarat adanya sebuah atmosfer pembebasan yang memungkinkan anak-anak tidak lagi mengenal perbedaan kelompok, sebaliknya anak yang semula berangkat dari 'primordialisme' atau dari militansi komunitasnya mulai terbuka untuk menyatukan potensinya menjadi potensi bersama. Sanggar sendiri hanyalah salah satu alternatif ruang pembebasan diantara sederetan kemungkinan lain yang masih sangat terbuka. Kesamaan sanggar dengan alternatif model lain terletak pada nafas atau atmosfer pembebasan yang sama. Mungkin terlalu sederhana, tapi paling tidak satu indikasi yang bisa membantu kita untuk melihat apakah atmosfer sanggar itu mendukung harapan anak adalah kalau anak sendiri sebagai komunitas merasa fully alive, diterima satu dengan yang lain dan terbuka setiap kemungkinannya untuk mengembangkan potensinya.

Musik, dalam proses kehidupan anak-anak, merupakan organ atau salah satu media yang bisa menghantar anak-anak menjaga ketahanan atmosfer pembebasan. Musik tidak hanya memberikan peluang pengembangan internal di tingkat anak, entah mengembangkan potensi kreatif atau membuka peluang ekonomis. Musik juga bukan sebuah media yang eksklusif dan personal. Karena itu saya sangat setuju ketika anak-anak sepakat mengembangkan musik. Saya sendiri menempatkan musik sebagai salah satu media yang bisa digunakan anak-anak untuk belajar membangun sebuah organisasi dan *team work* yang solid. Disamping itu musik juga merupakan sebuah media komuniasi yang bisa diterima, baik oleh semua anak maupun masyarakat secara umum. Musik adalah ekspresi komunikatif yang tidak jarang mengajak setiap orang yang mendengar untuk melakukan interpretasi atau tekun memahami. Pada titik tertentu musik adalah angin yang mampu menyusup di setiap celah dan menembus di setiap batas untuk memberikan nafas yang membebaskan siapapun yang berada dlam ruang kepengapan.

Karena itu biarkan dengan musiknya anak-anak menunjukkan potensinya, meneriakkan kesakitannya, mengekspresikan kerinduannya pada sebuah bentuk pembebasan, mengkomunikasikan setiap harapan dan tuntutannnya pada siapapun yang memang seharusnya ikut bertanggung jawab pada kehidupan anak-anak.

Saya percaya bahwa masa depan pembebasan anak-anak ada di tangan anak-anak sendiri.

Jakarta, 22 Juni 1999